



## PNI: ORGANISASI POLITIK RADIKAL SOEKARNO DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA (1927-1931)

Hotman Pasaribu

[hotmanpasaribu71@gmail.com](mailto:hotmanpasaribu71@gmail.com)

Universitas Jambi

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci :

Organisasi Politik, Pergerakan Nasional Indonesia, PNI, Radikal, Soekarno.

#### Keywords:

Political Organization, Indonesian National Movement, PNI, Radical, Soekarno.



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author.

Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai peran Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai organisasi politik radikal yang dipimpin oleh Soekarno pada masa pergerakan nasional Indonesia antara tahun 1927-1931. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui kondisi politik menjelang berdirinya PNI, mengetahui proses berdirinya PNI pada tahun 1927, mengetahui sepak terjang PNI sebagai organisasi politik radikal, dan memahami proses kemerosotan PNI sehingga dibubarkan pada tahun 1931. Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) hadir sebagai wadah baru pergerakan Soekarno dan kawan-kawan pasca peristiwa Pemberontakan PKI 1926. PNI mengambil strategi radikal, yaitu diwujudkan dengan sikap nonkooperatifnya, menentang kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dan memperjuangkan tujuannya dalam menggalang persatuan dan kesatuan demi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1929, dilakukan penangkapan terhadap Soekarno dan tokoh PNI lainnya, partai lantas mengalami kemerosotan dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1931.

### ABSTRACT

*This research will discuss the role of the Indonesian National Party (PNI) as a radical political organization led by Soekarno during the Indonesian national movement between 1927-1931. The purpose of the research is to know the political conditions leading up to the establishment of the PNI, know the process of the establishment of the PNI in 1927, know the actions of the PNI as a radical political organization, and understand the process of the decline of the PNI so that it was dissolved in 1931. The research belongs to the type of qualitative research with historical research methods, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results revealed that the Indonesian National Party (PNI) was present as a new forum for the movement of Soekarno and his friends after the 1926 PKI Rebellion. PNI took a radical strategy, which was realized by its non-cooperative attitude, opposing the policies of the Dutch East Indies Colonial Government which were considered not in favor of the people, and fighting for its goals in mobilizing unity and integrity for Indonesian independence. At the end of 1929, there were arrests of Soekarno and other PNI leaders, the party then experienced a decline and was finally dissolved in 1931.*

### PENDAHULUAN

Pergerakan nasional merupakan sebuah periode sejarah Indonesia dalam melawan penjajahan pada kurun waktu 1908-1945. Dimulai dari lahirnya kesadaran nasional dan berdirinya organisasi modern yang memiliki tujuan serta struktur organisasi yang jelas, hingga berakhir dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pada fase awal pergerakan nasional seringkali disebut sebagai kebangunan nasional. Jika menyelisik ke belakang, pergerakan sebelum tahun 1908 masih belum bersifat nasional,

karena hanya terfokus pada perjuangan kelompoknya saja dan bersifat kedaerahan (Ahmadin, 2015: 1).

Lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 diyakini sebagai cikal bakal dimulainya sejarah pergerakan di Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh para pelajar STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), sekolah pendidikan dokter untuk priayi Jawa, berhasil menjadi pemrakarsa timbulnya pelbagai organisasi yang menjadi karakter pada masa pergerakan nasional (Perdana dan Pratama, 2022: 29). Melalui organisasi yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan kesamaan visi dan misi, kesadaran nasional dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang diinginkan kaum bumiputra dapat disalurkan. Organisasi yang hadir ini meliputi berbagai bidang (multidimensi), baik itu sosial, budaya, ekonomi, serta yang paling menonjol dan berdampak, yaitu politik (Wahyuni dan Mursal, 2022: 56).

Awal perlawanan radikal terhadap Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pergerakan nasional dapat dilihat sejak Tjipto Mangoenkoesoemo tidak berhasil mengubah arah Boedi Oetomo dari organisasi kultural menjadi politik. Menurut Wiryopranoto dkk (2017: 27) organisasi di bidang politik lebih memiliki orientasi radikal dibandingkan organisasi kultural (sosial-budaya). Radikal adalah sebuah bentuk perjuangan keras dan lawan dari sikap lunak dalam menghadapi para penjajah. Organisasi radikal semasa pergerakan nasional dapat diwujudkan melalui tindakan nonkooperatif (tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda) maupun dengan cara yang ekstrem seperti pemogokan.

Menggebunya semangat nasionalisme di antara kaum pergerakan mengubah haluan organisasi-organisasi yang awalnya mau bekerja sama (kooperatif) menjadi radikal, terlebih ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.P. van Limburg Stirum, yang menjabat antara tahun 1916-1921 berpaham liberal, sehingga radikalisasi tumbuh subur di Nusantara (Kurniawati dkk, 2015: 21). Selain itu, lahirnya organisasi radikal tahun pada rentang waktu 1920-1930 disebabkan oleh dua faktor, antara lain: 1) Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula sejak tahun 1918 setelah Perang Dunia I berakhir; 2) Terjadinya mutasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock yang memiliki sifat reaksioner (1921-1926) (Aji dkk, 2020: 66). Organisasi yang tergolong radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927 dan dipelopori oleh Soekarno beserta beberapa tokoh pergerakan yang tergabung di dalam *Algemeene Studie Club*. Organisasi politik ini didirikan untuk menjadi wadah perjuangan baru setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan. PKI yang awalnya sangat gigih menentang kebijakan Pemerintah Hindia Belanda sebagai organisasi radikal, melakukan pemberontakan pada tahun 1926/1927 di berbagai daerah di Nusantara. Sayangnya pemberontakan tersebut gagal dan banyak tokoh pemimpin PKI ditangkap, dipenjara, dan diasingkan, bahkan menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang (Valentina, 2022: 39). Partai Nasional Indonesia hadir sebagai organisasi politik yang nasionalis dan radikal untuk menyatukan persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan Indonesia melalui cara nonkooperatif dan tindakannya yang dengan tegas melawan penjajah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi politik menjelang berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI). Kondisi

yang dimaksud adalah pasca pemberontakan PKI antara tahun 1926 sampai 1927, di mana pemerintah merespon dengan cukup keras dengan menangkap, memenjarakan, dan mengasingkan banyak tokoh. Kedua, bertujuan untuk mengetahui proses berdirinya PNI pada bulan Juli 1927 oleh para tokoh pergerakan seperti Soekarno dan kawan-kawan. Meskipun PKI baru saja menyelenggarakan pemberontakannya, para tokoh bangsa tersebut tetap bersikeras mendirikan organisasi radikal sebagai wadah baru perjuangan. Ketiga, untuk mengetahui sepak terjang PNI sebagai organisasi politik radikal yang memiliki asas nonkooperatif, menentang kebijakan kolonial yang dianggap tidak berpihak, dan tentunya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terakhir, mengetahui kemerosotan PNI akibat dari keradikalannya terhadap pemerintahan. Dimulai dari Belanda yang menangkap dan memenjarakan tokoh-tokoh pemimpin PNI seperti Soekarno, hingga berakhir dengan dibubarkannya PNI pada tahun 1931 dan terpecah menjadi Partindo dan PNI-Baru.

Penelitian ini penting diterbitkan untuk mengetahui peran serta Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia sebagai organisasi politik/partai politik radikal. Meskipun kehadiran PNI begitu singkat jika dihitung dari sejak berdiri dan dibubarkan, organisasi ini tetap memberikan pengaruhnya dalam sejarah pergerakan Indonesia. Tentunya pengaruh dan peran PNI tersebut akan kita bahas dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul "*PNI: Organisasi Politik Radikal Pimpinan Soekarno dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1927-1931)*" ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Murdiyanto (2020: 19) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan yang tidak bisa dihasilkan dengan memakai cara kuantifikasi, prosedur statistik, dan lain sebagainya. Menurut Straus dan Corbin, penelitian yang meneliti tentang sejarah, fungsionalisasi organisasi, kehidupan masyarakat, gerakan sosial, dan hubungan kekeluargaan dapat menggunakan penelitian kualitatif (Murdiyanto, 2020: 19).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Kamus Pusat Bahasa (2008: 1022), metode merupakan sebuah cara yang sudah diatur berdasarkan pemikiran yang telah dipertimbangkan untuk memperoleh suatu tujuan (dalam ilmu pengetahuan); cara kerja yang tersistem dan teratur untuk dapat menyelenggarakan sebuah kegiatan dengan mudah, sehingga memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Padiatra, 2020: 29-31).

Heuristik adalah tahapan awal dalam sebuah penelitian sejarah dan menjadi landasan awal dalam membangun sebuah peristiwa sejarah. Tahapan heuristik terdiri dari kegiatan menelusuri jejak dari sumber-sumber kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, di mana sumber-sumber yang telah didapatkan pada tahap heuristik dikritik, apakah sumber tersebut relevan atau tidak terhadap penelitian, sehingga logika dan nalar dari seorang peneliti memainkan perannya dalam tahap ini. Tahap ketiga interpretasi, yakni tahapan dalam menginterpretasikan, membayangkan, mengilustrasikan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber

yang didapatkan dan telah dikritik. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menuliskan kembali sebuah peristiwa sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kondisi Politik Menjelang Berdirinya PNI***

PKI atau Partai Komunis Indonesia dalam melakukan pergerakannya sangat radikal, misalnya dengan melakukan pemogokan secara besar-besaran dengan menginisiasi buruh jika tuntutan mereka tidak disetujui. Contohnya, ketika Semaoen menyerukan aksi mogok bagi para buruh kereta api di Semarang pada tahun 1923, sebab tuntutan untuk membatalkan penghapusan tunjangan kemahalan tidak didengar (Yuliati, 2012: 14). Puncak pergerakan radikal PKI terjadi pada awal tahun 1926, di mana timbul gagasan untuk menyelenggarakan pemberontakan yang ditujukan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tan Malaka, salah satu tokoh PKI, tidak setuju terhadap gagasan tersebut, tetapi Alimin, Darsono, dan lainnya setuju. Sementara itu, Semaoen, pemimpin PKI, yang saat itu sedang berada di Moskow dalam kegiatan Komunis Internasional (Komintern) turut berpendapat bahwa garis komando antara basis massa pendukung PKI dan kekompakkan organisasi belum terjalin, sehingga belum siap untuk mengadakan pemberontakan (Sudiyo dkk, 1997: 73). Meskipun demikian, PKI tetap melancarkan aksinya.

Pemberontakan PKI meletus di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Batavia, Banten, dan Priangan yang terjadi pada 12 November 1926, serta Sumatera Barat pada 1 Januari 1927. Pemberontakan tersebut dapat dengan mudah diredam, di Batavia hanya sehari kemudian, di Banten dan Priangan pada bulan Desember, dan Sumatera Barat pada 4 Januari 1927 (Ricklefs, 2007: 371). Pada dasarnya sebelum PKI mengadakan pemberontakan, banyak di antara tokoh pimpinannya yang ditangkap ataupun melarikan diri, misalnya Darsono yang ditangkap pada bulan September 1925 dan Musso yang melarikan diri ke Singapura awal tahun 1926.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kala itu menjabat, Andries Cornelies Dir de Graeff, merespon dengan mengasingkan orang-orang yang dianggap dapat mengganggu kekuasaan Belanda, dengan tujuan agar pemberontakan baru tidak lahir. Sebanyak 1.038 orang ditangkap dan diasingkan ke Digul, Irian Barat (sekarang Papua) di mana rombongan pertama yang diberangkatkan adalah para pelaku yang berperan dalam Pemberontakan PKI 1926/1927 di Banten, bahkan 823 di antaranya ditempatkan ke Tanah Merah, 500 km dari daerah pantai selatan di hulu sungai Digul, yang lokasinya terkenal sangat terpencil (Meteray, 2022: 57). Menurut Ricklefs (2007: 378), kegagalan pemberontakan yang digagas oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada rentang waktu 1926 sampai 1927 dan ditambah dengan melemahnya peran Sarekat Islam (SI), menjadi faktor berdirinya organisasi nasionalis. Hal ini menandakan sebuah lembaran baru dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang diisi oleh organisasi politik dengan paham nasionalisnya.

### ***Berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI)***

Pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926/1927 yang mengalami kegagalan dan dianggap sebagai organisasi terlarang, terjadi semacam kekosongan organisasi pergerakan yang secara tegas menentang kebijakan kolonial (radikal). Kaum

nasionalis menilai bahwa dibutuhkan sebuah organisasi baru sebagai wadah pergerakan yang dapat menampung harapan dan tujuan masyarakat yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927 di Regengsweg No. 22, Bandung diadakan sebuah pertemuan oleh beberapa tokoh nasionalis, yakni Soekarno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Iskaq Tjokrohadisurjo, Sartono, Boediarto Martoatmojo, Soenario, Anwari, dan Samsi Sastrowidagdo yang tergabung di dalam organisasi *Algemeene Studie Club*. Rapat ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah partai politik yang bersifat nasional dan radikal sebagai wadah kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang hadir, yakni Tjipto Mangoenkoesoemo sebenarnya tidak setuju atas pembentukan partai politik tersebut, mengingat baru 1 tahun terjadinya pemberontakan PKI 1926 dan dirinya yang sedang diasingkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ke Bandung karena dianggap menjadi kolaborator Partai Komunis Indonesia (Tirta, 1985: 42). Namun, melalui pertemuan ini tetap berdirilah sebuah organisasi yang bergerak di bidang politik atau partai politik yang diberi nama PNI. Pada akhirnya terdapat sepuluh orang yang menjadi pendiri PNI selain kedelapan tokoh yang hadir dalam rapat tersebut, kedua orang yang dimaksud adalah Jan Tilaar dan Soedjadi yang dianggap berjasa terhadap pembentukan PNI. Berdirinya Partai Nasional Indonesia tidak terlepas dari tujuannya untuk memperoleh kemerdekaan, yang berasaskan *self help*, nonkooperatif, dan Marhaenisme. Oleh karena PNI berasaskan nonkooperatif, Soedjadi melepaskan pekerjaannya sebagai pegawai negeri dan bekerja sebagai karyawan swasta.

PNI awalnya merupakan akronim dari Perserikatan Nasional Indonesia, nama PNI ketika baru berdiri, tetapi kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia 1 tahun kemudian dalam kongres pertamanya di Surabaya pada bulan Mei 1928 (Ricklefs, 2007: 378). Seperti organisasi pada umumnya semasa pergerakan nasional, Partai Nasional Indonesia memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Soekarno yang dinilai paling populer menjabat sebagai ketua organisasi dan Iskaq menjadi sekretaris/bendahara pada kepengurusan awal PNI. Partai Nasional Indonesia (PNI) hadir sebagai pemrakarsa organisasi politik nasionalis, yang tidak sama dengan Sarekat Islam (SI) yang bersifat keagamaan (Islamisme) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bersifat komunis (Marxisme) (Sudiyo dkk, 1997: 76). Oleh karena itu, PNI memiliki sifat netral dengan tidak membedakan agama maupun pandangan anggotanya, sehingga keanggotaan PNI lebih beragam.

### ***Sepak Terjang PNI sebagai Organisasi Radikal***

Sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri pada tahun 1927, pihak kolonial sebenarnya telah menaruh rasa curiga. Pemerintah Hindia Belanda berpikir bahwa PNI sebenarnya merupakan kelanjutan dari PKI yang telah menyelenggarakan pemberontakan tahun 1926/1927. Pada dasarnya antara PNI dan PKI memiliki ideologi yang berbeda, tetapi sama-sama mengganggu tampuk kekuasaan Belanda di Nusantara. PNI adalah organisasi politik nasionalis yang selalu menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan demi memperoleh Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Salah satu tindakan nyatanya melalui pendirian Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 18 Desember 1927 yang diinisiasi oleh PNI (Sudiyo dkk, 1997: 77). Terdapat beberapa partai politik yang

bergabung di dalam PPPKI, yakni PSI, PNI, PBI, Boedi Oetomo, Sumatranen Bond dan Pemuda Kaum Betawi.

Soekarno, pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI), secara terbuka menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya bersifat radikal, yaitu dengan tidak takut melawan segala bentuk tindakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dianggap tidak berpihak terhadap rakyat bumiputera (Valentina, 2022: 41). Seperti kebanyakan organisasi politik dan kultural (sosial-budaya) lainnya di masa pergerakan nasional, Partai Nasional Indonesia tentu menyelenggarakan kongres organisasinya dalam kurun waktu tertentu untuk membahas mengenai program kegiatan maupun mengganti struktur kepengurusan organisasi. PNI melaksanakan kongres sebanyak dua kali, yaitu kongres pertama pada tanggal 28 s.d. 30 Mei 1928 di Surabaya dan kongres kedua pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 1929 di Jakarta (Tirta, 1985: 44). Melalui kongres yang diadakannya, PNI selalu berupaya menentang kebijakan yang dirasa merugikan, memperjuangkan hak rakyat, dan tentu berupaya mewujudkan tujuan partai

**Gambar 1** Kongres Pertama PNI di Surabaya (dari kiri ke kanan: Samsi, Soekarno, dan Iskaq)



Sumber: Southeast Asian & Caribbean Images (*Koninklijk Instituut voor Taal – Land – en Volkenkunde/KITLV*)

Kongres Pertama PNI diadakan di Gedung Stadstuin Theater, Surabaya yang terbagi menjadi dua jenis rapat, yakni rapat tertutup (*besloten vergadering*) yang hanya dapat dihadiri oleh para pemimpin PNI dan rapat terbuka (*openbare vergadering*) yang dihadiri oleh ribuan massa partisipan PNI, wakil Pemerintah Hindia Belanda, dan PID (Politieke Inlichtingen Dienst) atau Dinas Intelijen Politik di Hindia Belanda. Terdapat tiga tokoh yang menjadi pembicara, yakni Soekarno yang membahas asas PNI, Iskaq tentang *Exorbitante Rechten*, dan Sartono tentang hak-hak berkumpul, berserikat, menulis, dan mencetak. Pada hari pertama, Soekarno mengungkapkan tentang asas PNI, mulai dari *self help* (berjuang dengan usaha sendiri/berdikari), nonkooperatif (tidak bekerja sama dengan pihak kolonial), dan Marhaenisme (Aji dkk, 2020: 70). Selain itu, menurut Bung Karno dengan usaha membangkitkan *nationale wil* (tekad nasional), *nationale geest* (jiwa nasional), dan *nationale daad* (tindakan nasional) akan membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Dikutip dari Tirta (1985: 45-46), ketika hari kedua giliran Iskaq yang berbicara mengenai *Exorbitante Rechten*, dengan menegaskan bahwa:

"Dengan adanya hak-hak luar biasa di tanah air kita ini maka senantiasa terancamlah kemerdekaan diri kita, dengan adanya hak-hak luar biasa itu, maka bagi rakyat

Indonesia tidak adalah kepastian dan ketentuan untuk bergerak merdeka, dan tidak adalah ketentuan tanggungan pemerintah akan tidak sewenang-wenang menghalang-halangi kemerdekaan diri kita, menyempitkan lapangan untuk bergerak merdeka.”

*Exorbitante Rechten* sendiri ialah wewenang luar biasa yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sedang menjabat untuk menangkap, memenjarakan, dan mengasingkan orang-orang yang dianggap mengganggu ketentraman umum (kekuasaan Belanda) (Kurniawati dkk, 2015: 28). Diperkirakan sebanyak 1.300 orang yang menjadi korban dari hukuman *Exorbitante Rechten*. Setelah Iskaq Tjokrohadisurjo selesai membacakan tema pembicaraannya, Soekarno sebagai pimpinan sidang sekaligus ketua PNI mengatakan kepada hadirin, “apakah mereka semua setuju atas hak luar biasa gubernur jenderal (*Exorbitante Rechten*)”, kemudian dengan disertai teriakan mereka yang hadir kompak menjawab “tidak setuju”. Padahal peserta yang hadir bukan hanya dari kalangan PNI, melainkan juga dari wakil Pemerintah Hindia dan PID. Hal ini menandakan bahwa Partai Nasional Indonesia secara terbuka berani menentang kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang dianggap tidak berpihak dan menjegal semangat kemerdekaan oleh para kaum pergerakan (Tirta, 1985: 46).

Secara garis besar, menurut Aji dkk (2020: 72-73) terdapat beberapa agenda atas upaya mewujudkan tujuan PNI berdasarkan hasil kongres pertamanya, antara lain:

- Bidang Politik
  1. Memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia;
  2. Menyearluaskan ilmu pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional, serta membenahi hukum di Nusantara;
  3. Memperkuat relasi antarnegara Asia;
  4. Menggugat kemerdekaan diri, penyiaran, berserikat, dan berkumpul.
- Bidang Ekonomi
  1. Perekonomian nasional yang *self help*;
  2. Memberi bantuan terhadap perindustrian dan perdagangan nasional;
  3. Mengantisipasi terjadinya riba dengan mendirikan bank nasional dan koperasi.
- Bidang Sosial
  1. Memajukan pendidikan nasional;
  2. Membenahi posisi para perempuan;
  3. Memajukan kedudukan perhimpunan buruh dan tani;
  4. Membenahi masalah kesehatan masyarakat;
  5. Mendorong sistem monogami (memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri).

Sementara itu, terdapat beberapa hasil dan keputusan penting selama berlangsungnya Kongres Pertama PNI, mulai dari mengubah nama yang sebelumnya “Perserikatan Nasional Indonesia” menjadi “Partai Nasional Indonesia”, mengesahkan cabang-cabang PNI di beberapa daerah (Jakarta, Mataram/Yogyakarta, Cirebon, dll), dan yang terutama adalah mencetuskan pembuatan surat kabar partai yang diberi nama Persatuan Indonesia. Dalam perjalanannya, surat kabar Persatuan Indonesia dinilai paling garang dalam mengkritik dan menolak kebijakan kolonialisme Belanda jika dibandingkan

surat kabar lainnya (Tirta, 1985: 47). Persatuan Indonesia selalu berada di garda terdepan dalam menyebarkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya melalui Kongres Kedua PNI pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 1929 di Jakarta, lagi-lagi Soekarno menyatakan untuk percaya terhadap diri sendiri, tekad pengurus partai yang berjuang dengan penuh semangat melewati berbagai halangan, dan mengimbau seluruh peserta kongres mencapai cita-cita Indonesia yang merdeka.

Kongres-kongres yang diadakan PNI senantiasa menunjukkan radikalismenya dengan menegaskan aliran organisasi politiknya yang nasionalis, serta dengan lantang menegaskan bahwa degenerasi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Hindia Belanda disebabkan oleh kolonialisme dan imperialisme Belanda (Perdana dan Pratama, 2022: 62). Oleh karena itu, melalui kegiatannya yang radikal di dalam PNI dan orasinya di depan khalayak ramai, Soekarno sebagai pemimpin partai mulai mendapat sorotan tajam dari pemerintah kolonial. Menurut Suwondo (1977/1978: 75) ketakutan dan kekhawatiran Belanda semakin menjadi ketika mengetahui di kalangan polisi maupun tentara terindikasi pengaruh propaganda PNI, sehingga Gubernur Jawa Barat mengambil tindakan tegas dengan melarang anggota polisi bergabung dengan Partai Nasional Indonesia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, A.C.D. de Graeff, pada 15 Mei 1928 di sidang Volksraad (Dewan Rakyat) menyatakan gagasannya untuk mengirimkan peringatan terhadap para tokoh pemimpin PNI agar lebih berhati-hati dalam ucapannya (Zalukhu dan Subaryana, 2020: 12). Selain itu, de Graeff juga mendapat perintah dari Belanda untuk membatasi gerak-gerik PNI, sehingga Soekarno mulai diawasi oleh polisi Belanda.

### ***Kemerosotan PNI***

Ibarat semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya, pertumbuhan PNI dan meningkatnya kritikan yang diberikan bagi pemerintah kolonial, maka tersiar kabar bahwa Partai Nasional Indonesia akan melakukan revolusi atau menggulingkan tampuk kekuasaan Belanda pada tahun 1930 (Aji dkk, 2020: 73). Meskipun keanggotaan PNI tidak sebesar PSI, tetapi disadari atau tidak pengaruh Soekarno bersama partai politik radikal yang dipimpinya itu membawa pengaruh yang signifikan, sehingga mengkhawatirkan pihak kolonial. Dikutip dari Perdana dan Pratama (2022: 68), Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah pada 24 Desember 1929 untuk mulai menangkapi para tokoh PNI, karena beranggapan partai tersebut terus menyebarluaskan paham pergerakan kemerdekaan yang membahayakan posisinya. Barulah pada 29 Desember 1929 di Yogyakarta dilakukan penangkapan oleh petugas PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) terhadap Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Soepriadinata, Maskoen Soemadiredja, dan tokoh PNI lainnya di berbagai daerah. Penangkapan Soekarno dan para tokoh penting PNI lainnya membawa dampak terhadap merosotnya partai yang mengalami regresi dan disintegrasi antaranggota.

Pemerintah Hindia Belanda sempat memberikan peringatan yang keras kepada pimpinan PNI yang berada di luar tahanan pada bulan Januari 1930, di mana Partai Nasional Indonesia tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas politik selama belum diputuskannya tuntutan atas para pemimpin partai yang berada di tahanan. Setelah dilakukan penahanan yang cukup lama, antara tanggal 18 Agustus s.d. 29 September 1930

diselenggarakan persidangan di Pengadilan Pemerintah Kolonial Belanda (Landraad) Bandung. Soekarno, pemimpin PNI, membacakan pleidoi tentang revolusi rakyat terjajah dan penindasan oleh penjajah, yang dikenal dengan nama "Indonesia Menggugat" (Sudiyo dkk, 1997: 79). Selepas Soekarno dan kawan-kawan divonis bersalah, para pemimpin partai beranggapan bahwa PNI sebenarnya sudah menjadi organisasi terlarang.

Pada tanggal 25 April 1931 diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) PNI Kedua di Jakarta, yang hasil keputusannya menyatakan bahwa PNI dibubarkan. Terjadi pro dan kontra antaranggota, bagi yang setuju atas pembubaran ini kemudian mendirikan Partindo (Partai Indonesia) dengan dipimpin oleh Sartono. Sebaliknya, anggota yang tidak setuju kemudian bersama Hatta dan Syahrir mendirikan PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Partindo hadir dengan membawa cara-cara lama PNI (aksi massa), sementara itu PNI-Baru muncul dengan pendidikan politik dan sosialnya. Walaupun demikian, kedua organisasi pecahan PNI tersebut tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tindakan nonkooperatifnya (Sudiyo dkk, 1997: 80).

PNI-Baru resmi berdiri pada Desember 1931, tepat setelah Syahrir pulang dari Belanda, kemudian disusul oleh Hatta yang segera mengambil alih pucuk kepemimpinan pada Agustus 1932. Setelah dikurangi masa tahanannya oleh de Graeff, Soekarno akhirnya keluar dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931. Bung Karno segera mencoba menyatukan kembali organisasi pergerakan nasionalis antara Partindo dan PNI-Baru, tetapi gagal, setahun kemudian pada bulan Agustus 1932, ia akhirnya bergabung ke dalam Partindo karena memiliki prinsip yang sama atas aksi massa (Ricklefs, 2007: 390). Meskipun demikian, Partindo dan PNI-Baru sama-sama hadir sebagai organisasi politik nonkooperatif yang tetap berani menentang kebijakan penjajah dan memperjuangkan Indonesia yang merdeka seperti Partai Nasional Indonesia (partai pendahulunya), meskipun memiliki perbedaan dari cara pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Partai Nasional Indonesia (PNI) hadir sebagai organisasi di bidang politik atau partai politik radikal yang menjadi wadah baru kaum pergerakan menyuarakan aspirasinya dalam menentang kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, mengingat tidak ada lagi partai politik yang cukup "radikal" setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1926/1927 dan berakhir dicap sebagai organisasi terlarang. Soekarno membawa PNI sebagai partai politik radikal dan nasionalis, berbeda dengan Partai Syarikat Islam (PSI) yang berlandaskan agama (Islamisme) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berlandaskan komunis (Marxisme).

PNI dalam kegiatannya berasaskan prinsip *self help* (berdikari), nonkooperatif (tidak bekerja sama dengan penjajah), dan Marhaenisme. Dalam implementasinya yang bertujuan untuk menyebarkan semangat persatuan dan kesatuan demi kemerdekaan Indonesia, PNI mengambil strategi perjuangan radikal. Walaupun tidak seradikal PKI yang begitu ekstrem (melakukan boikot), tetapi keradikalan Partai Nasional Indonesia dapat dilihat dari sikap nonkooperatifnya, hasil kongres yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan menentang kebijakan Hindia Belanda yang dianggap tidak berpihak bagi kaum bumiputera seperti *Exorbitante Rechten*, dan melalui surat kabarnya "Persatuan Indonesia" yang dengan lantang menyuarakan tujuan PNI. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menganggap PNI sebagai organisasi politik radikal yang mengusik panggung

kekuasaannya melalui kegiatan dan propagandanya, sehingga mulai menangkapi satu persatu tokoh sentral partai, seperti Soekarno dan kawan-kawan pada tahun 1929, hanya dua tahun berselang setelah PNI didirikan. Kehilangan tokoh pemimpin dan dimatikannya pergerakan partai menyebabkan kemunduran bagi Partai Nasional Indonesia, sehingga pada kongres luar biasa tahun 1931 PNI dibubarkan dan terpecah antara Partindo dan PNI-Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2017). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Aji, B. R.N. dan Sumarno, Sumarno dan Hermawan, Eko Satriya. (2020). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme*. Surabaya: Unesa University Press.
- Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kurniawati, A. F., Yuniyanto, T., & Bachri, S. (2015). Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1916-1942. *Candi*, 10(2), 16.
- Meteray, B. (2022). Kontestasi Nasionalisme Indonesia pada Tiga Daerah Penyemaian di Papua. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 48(1), 47-62. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1180>.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press.
- Perdana., Yusuf., Rinaldo, A. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Southeast Asian & Caribbean Images (KITLV). *Het eerste congres van de Partai Nasional Indonesia (PNI) te Soerabaja, met achter de tafel de drie leiders (v.l.n.r.), vermoedelijk Samsi Sastrowidagdo, voorzitter Soekarno en, vermoedelijk, secetaris-penningmeester Tjokrohadioerjo Iskaq*. Diperoleh dari <http://hdl.handle.net/1887.1/item:761615>, pada tanggal 1 Oktober 2023.
- Sudiyo, Sudiyo dan Santono, Dalimun dan Nugroho, Agus dan Suwardi, Edy. (1997). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwondo, B. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tirta, N. W. A. (1985). *Mr. Sartono: Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Valentina, N. (2022). PNI Organisasi Politik Sesudah 1926. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1), 38-44. <https://doi.org/10.31258/hjps.2.1.38-44>.
- Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942. *Jurnal Sejarah*, 2(1), 54-67.

- Wiryopranoto, Suhartono dan Herlina, Nina dan Marihandono, Djoko dan Tangkilisan, Yuda B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Pengabdianannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Yuliati, D. (2012). Nasionalisme Buruh dalam Sejarah Indonesia. *HUMANIKA*, 16(9), 1-26. <https://doi.org/10.14710/humanika.16.9>.
- Zalukhu, T. M., & Subaryana. (2020). Soekarno dan Perjuangannya dalam Partai Nasional Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 19(2), 9-14.